

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, GENERAL ALLOCATION OF FUNDS, FUEL SUBSIDY ON INDONESIA'S INCOME DISPARITY

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, SUBSIDI BBM TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN INDONESIA

Anjar Noer Hartanti¹, M. Taufiq²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

taufiqbn4@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of income disparity in Indonesia which has not yet reached a low stage. There are several factors that cause income disparities to be evenly distributed or not, namely economic growth based on Kuznet's theory, general allocation funds and fuel subsidies with the initial aim of reducing income disparities which are considered not in accordance with these initial objectives. So the purpose of this study is to find out whether there is an influence from economic growth, general allocation funds and fuel subsidies on Indonesia's income disparity in the 2007-2021 period. The research method used in this study is quantitative using data on the Gini index, economic growth, general allocation funds and Indonesia's fuel subsidies for the 2007-2021 period where the data was obtained through observation by researchers. The research data were then analyzed using SPSS version 25.0 with multiple linear regression analysis techniques. The research results that have been produced in this study are that economic growth has no significant effect on Indonesia's income disparity, general allocation funds have a significant positive effect on Indonesia's income disparity and fuel subsidies on Indonesia's income disparity.

Keywords: *Income disparity, economic growth, general allocation fund, subsidized fuel*

ABSTRAK

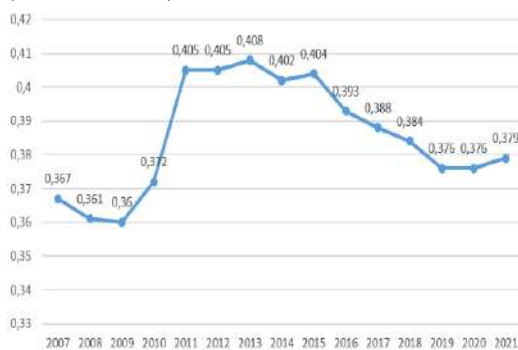
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah disparitas pendapatan di Indonesia yang belum mencapai tahap yang rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan merata atau tidaknya disparitas pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi yang didasari teori Kuznet, dana alokasi umum dan subsidi BBM dengan tujuan awal untuk mengurangi disparitas pendapatan dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan subsidi BBM terhadap disparitas pendapatan Indonesia periode tahun 2007-2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data indeks gini, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan subsidi BBM Indonesia periode tahun 2007-2021 dimana data tersebut diperoleh melalui observasi peneliti. Data penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 25.0 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang telah dihasilkan dalam penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia, dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas pendapatan Indonesia dan subsidi BBM terhadap disparitas pendapatan Indonesia.

Kata kunci: Disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan yaitu pembagian pendapatan yang ada dalam suatu kelompok. Nilai unsur produksi yang digunakan dalam proses produksi memberikan imbalan kepada pemilik faktor produksi. Masalah pendistribusian pendapatan telah menjadi masalah yang kompleks terutama dalam mengatasi disparitas pendapatan karena perbedaan daya produktif setiap orang, ketika satu orang ataupun kelompok memiliki daya produktif yang lebih tinggi daripada orang ataupun kelompok lainnya (Kalalo et al., 2016). Kondisi disparitas pendapatan yang cenderung meningkat harus diwaspadai.

Salah satu akibat dari kesenjangan pendapatan adalah inefisiensi ekonomi yang melemahkan efisiensi ekonomi dan solidaritas sosial serta menimbulkan ketimpangan yang dianggap tidak adil hingga pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Lembaga keuangan Swiss yaitu Credit Suisse menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki masalah disparitas pendapatan tinggi di Asia Tenggara setelah Thailand. Hal ini tentu harus segera diatasi karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak yang akan menimbulkan dampak negatif yang lebih kompleks (Murti, 2016).



Gambar 1.

Berdasarkan gambar 1 tersebut, nilai indeks gini Indonesia lebih dari 0,35 dan lebih kecil dari 0,50. Negara-negara dengan disparitas rendah memiliki indeks Gini antara 0,20 dan 0,35 dan disparitas tinggi antara 0,50 dan 0,70. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan di Indonesia masih belum berada pada level yang rendah dan perlu ditelaah lebih detail mengingat disparitas pendapatan yang terus menerus terjadi di masyarakat akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. (Heryanah, 2017).

Salah satu hal yang menjadi faktor disparitas pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan disparitas mulai mengemuka ketika Simon Kuznets (Todaro & Smith, 2011) menyatakan mengemukakan hipotesis U terbalik atau lebih dikenal dengan teori kuznet yang menjelaskan bahwa disparitas pendapatan cenderung memburuk pada awal pertumbuhan ekonomi, setelah tingkat tertentu disparitas pendapatan menjadi lebih merata. (Nazipawati, 2019).

Pemerintah terus berupaya untuk menekan tingkat disparitas pendapatan di Indonesia dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan tujuan penciptaan aspek kemandirian daerah dan mengatasi ketimpangan yang bersifat horizontal maupun vertikal melalui pemberian dana alokasi umum kepada daerah (Korry, 2018). Namun dengan memiliki anggaran alokasi umum yang terlalu besar menimbulkan kesan bahwa daerah tidak mandiri secara finansial, yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah bergantung pada dana negara (Nugraha, 2019).

Selain pemberian dana alokasi umum kepada daerah, dalam rangka mengatasi disparitas pendapatan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan subsidi BBM dimana salah satu komoditas yang sangat penting dalam segala kegiatan ekonomi adalah bahan bakar minyak (BBM). Permintaan bahan bakar yang tinggi membuat sebagian dari permintaan bahan bakar dalam negeri bergantung pada pembelian luar negeri atau impor yang lebih mahal, yang menyebabkan diberlakukannya subsidi bahan bakar dengan tujuan agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses subsidi tersebut sehingga secara tidak langsung akan memberikan keringanan kepada masyarakat tersebut dan pada akhirnya akan mengecilkan tingkat disparitas pendapatan. Namun, jika kebijakan subsidi BBM pemerintah mengarah pada semakin sedikit keberpihakan golongan kelas bawah, hal itu mendorong tingginya disparitas pendapatan (Diva, 2015).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat sebuah topik penelitian terkait disparitas pendapatan di Indonesia dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum Dan Subsidi BBM Terhadap Disparitas Pendapatan Indonesia” dengan tujuan kajian atau penelitian itu sendiri, yaitu untuk mengetahui apakah kedisparitas pendapatan Indonesia tahun 2007 ke 2021 terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan subsidi bahan bakar minyak.

Ekonomi Pembangunan

Grand Theory pada penelitian ini yaitu Ekonomi Pembangunan. Menurut Fitriani et al., (2018), istilah ini mengacu pada sub-bidang ekonomi yang berfokus pada transformasi sosial, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi

yang terkait dengan perkembangan negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi dapat dilihat sebagai prosedur yang dari waktu ke waktu meningkatkan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara (Arsyad, 2015).

Teori Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat tidak sama sehingga terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup besar di masyarakat sehingga membuat kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin (Al & Subrata, 2018).

Menurut Arsyad (2015), beberapa faktor penyebab disparitas pendapatan antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang lamban, pembangunan yang tidak merata, penggunaan kebijakan substitusi impor industri yang menaikkan harga barang-barang manufaktur guna melindungi kelas kapitalis, dan merugikan hasil kerajinan rakyat. usaha seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Indikator disparitas pendapatan dapat dilakukan dengan berbagai pengukuran yang secara umum sering digunakan untuk berbagai penelitian maupun pengetahuan, pengukuran tersebut diantaranya adalah kurva Lorenz dan indeks gini.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets dalam, Fitriani et al., (2018) menyebutkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perluasan atau peningkatan aktivitas ekonomi selama periode waktu yang panjang di suatu negara. dalam melakukan penyediaan berbagai barang ekonomi bagi penduduk. Para penganut model neoklasik berasumsi bahwa mobilitas faktor produksi baik berupa modal atau tenaga kerja lebih

rendah di awal suatu proses pembangunan. Akibatnya, lebih banyak modal dan tenaga kerja berpengetahuan berkumpul di daerah yang lebih maju, memperlebar perbedaan dalam pembangunan daerah. Namun, seiring berjalannya pembangunan, pergerakan tenaga kerja dan modal akan menjadi lebih mudah seiring dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas komunikasi. Dengan demikian, seiring kemajuan negara, perbedaan regional dalam pembangunan berkurang, yaitu terjadinya konvergensi (Damayanti, 2019).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menekan angka disparitas pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi bagaimana suatu wilayah berkembang. Tingkat pertumbuhan yang lebih cepat akan mengarah pada tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi di masyarakat. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan kapasitas produksi dan output produksi sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menaikkan pendapatan per kapita dan kemudian perbedaan pendapatan antar daerah akan semakin menurun (Ramadhan, 2021).

Teori Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah uang atau anggaran yang berasal dari pendapatan APBN dan disediakan dengan tujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Peraturan Pemerintah RI, 2004).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 17 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan merupakan undang-undang dasar yang berkaitan dengan alokasi umum dana (Peraturan Pemerintah RI, 2005).

Hubungan Dana Alokasi Umum Dan Disparitas Pendapatan

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, tujuan pengalokasian DAU adalah untuk mendorong pemerataan kemampuan ekonomi antar daerah sehingga daerah yang kurang sejahtera mendapatkan alokasi DAU yang besar secara tidak proporsional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil disparitas antar daerah (Peraturan Pemerintah RI, 1999).

Terdapat suatu asumsi yang bertentangan dengan tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum, bahwa penyediaan dana alokasi umum secara berlebihan akan menyebabkan pemerintah daerah lebih mengandalkan dana negara (Sulaiman & Ridwan, 2019).

Teori Subsidi BBM

Sebagaimana ditunjukkan dalam RAPBN tahunan dan lampiran keuangan, subsidi BBM yaitu pembayaran dari pemerintah Republik Indonesia kepada pihak pemilik monopoli distribusi BBM di Indonesia yakni Pertamina (sejak 2009 tidak lagi dimonopoli) dimana pendapatan Pertamina dari pengiriman BBM lebih rendah dari anggaran pengeluaran dalam penyediaan BBM tersebut (Masrum, 2022). Pada realitanya, di Indonesia perlu ditelaah lebih dalam lagi apakah subsidi BBM ini sudah tepat pada sasaran atau belum, karena muncul beberapa berita bahwa subsidi BBM sebagian masih dinikmati masyarakat

golongan menengah ke atas. BBM bersubsidi di Indonesia sebesar 84% masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah keatas dan hanya sebesar 16% dinikmati oleh masyarakat kelas bawah (Anas, 2019)

Hubungan Subsidi BBM Dan Disparitas Pendapatan

Subsidi universal (subsidi yang dapat dinikmati semua orang) menawarkan manfaat absolut yang jauh lebih besar bagi golongan masyarakat kaya daripada golongan masyarakat miskin. Peningkatan subsidi BBM meningkatkan defisit anggaran yang dapat memberikan pengaruh pada stabilitas dan kesinambungan perekonomian negara. Menaikkan subsidi BBM juga menciptakan *trade-off*, yaitu keleluasaan pemerintah dalam mendanai program-program sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, upaya pengurangan subsidi BBM telah diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan dari waktu ke waktu (Keuangan, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana menggunakan objek penelitian yaitu nilai indeks gini untuk melihat tingkat disparitas pendapatan serta laporan *world bank* mengenai data pertumbuhan ekonomi dan laporan APBN dimana didalam laporan tersebut terdapat data dari dana alokasi umum dan subsidi BBM.

Metode Pengumpulan Data dan Sampel Penelitian

Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan subsidi BBM digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dan disparitas pendapatan digunakan sebagai variabel

dependen. Laporan *world bank* dan laporan APBN di Indonesia menjadi populasi untuk model penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan *purpose sampling* dimana penentuan sampel berdasarkan pada laporan dari *world bank* dan APBN terdiri nilai pertumbuhan ekonomi, indeks gini ratio serta realisasi dana alokasi umum, subsidi BBM pemerintah Indonesia periode tahun 2007-2021.

Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda, yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur dampak dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, adalah teknik terkenal untuk pengujian dan analisis asumsi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan alat SPSS 25.0 dalam pengolahan serta untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, digunakan pengujian hipotesis..

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n + e$$

Keterangan :

a = konstanta

Y = indeks gini

X¹ = pertumbuhan ekonomi

X² = dana alokasi umum

X³ = subsidi BBM

b₁- b₃ = koefisien dari variabel independen

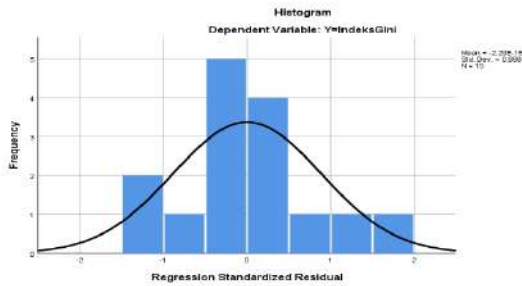
e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

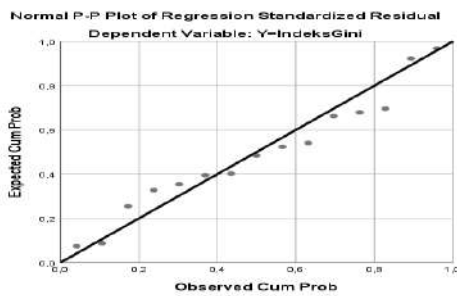
Uji Normalitas

Agar peneliti tau apakah pada penelitian sudah terdistribusi normal maka dilakukan uji normalitas. Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dan *normal probability plot*. Hasil tes tercantum di bawah ini.:



Gambar 2.

Sumber: Output SPSS yang diolah



Gambar 3.

Sumber: Output SPSS yang diolah

Dari gambar 2 dan 3 diatas dapat dikatakan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal. ditunjukkan dengan kurva histogram berbentuk lonceng dan titik titik mendekati garis regresi.

Uji Multikolonieritas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel-variabel independen. Hasil berikut diperoleh dari pengujian ini menggunakan nilai toleransi dan VIF:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	Statistics VIF
1	X1 = Pertumbuhan Ekonomi	0,774	1,292
	X2 = Dana Alokasi Umum	0,747	1,339
	X3 = Subsidi BBM	0,754	1,327

a. Dependent Variable: Indeks Gini

Sumber: Output SPSS yang diolah

Pada tabel 1 diatas ditampilkan hasil dimana nilai *tolerance* pada masing-masing variabel tersebut memiliki hasil yang >0,10 dan hasil VIF pada masing-masing variabel independen memiliki hasil <10 maka

dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini berusaha untuk memastikan apakah ada korelasi atau hubungan antara tingkat kesalahan periode sekarang dengan tingkat kesalahan periode sebelumnya dengan melihat nilai Durbin Watson yang kemudian dianalisa sehingga dapat dilihat apakah terdapat masalah autokorelasi atau tidak.

Tabel 2. Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,738 ^a	,546	,420	,012777	1,583

a. Predictors: (Constant), X3=SubsidiBBM, X1=PertumbuhanEkonomi, X2=DanaAlokasiUmum

b. Dependent Variable: Y=IndeksGini

Sumber: Output SPSS yang diolah

Dengan melihat angka Durbin-watson diatas, maka dapat maka diperoleh hasil $d_l \leq d \leq d_u$ Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa tidak ada pilihan keputusan atau tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan tidak ada keputusan. Pengujian tambahan diperlukan untuk mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan uji Runs Test.

Tabel 3. Hasil Uji Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00052
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	7
Z	-,521
Asymp. Sig. (2-tailed)	,603

a. Median

Sumber: Output SPSS yang diolah

Melihat pada hasil uji autokorelasi dengan Run Test pada gambar 4.3 dapat diketahui nilai asymp sig. 2-tailed) sebesar 0,603> dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi atau model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengidentifikasi model regresi apakah terdapat perbedaan *variance* dari residual yang diamati dari observasi satu ke observasi lain. Uji Glejser digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,079E-5	,012		-.006	,996
	X1=PertumbuhanEkonomi	,001	,001	,319	,974	,351
	X2=DanaAlokasiUmum	1,002E-17	,000	,136	,407	,692
	X3=SubsidiBBM	-8,124E-19	,000	-.008	-.023	,982

a. Dependent Variable: REB2

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 0,351, dana alokasi umum memiliki nilai signifikan sebesar 0,692, dan subsidi BBM memiliki nilai signifikan sebesar 0,982. Hal ini menunjukkan bahwa semua nilai sig > 0,05 membuktikan bahwa penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan subsidi BBM berpengaruh terhadap disparitas pendapatan, dengan temuan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,327	,019		17,534	,000
	X1=PertumbuhanEkonomi	,001	,002	,191	,624	,427
	X2=DanaAlokasiUmum	1,302E-16	,000	,717	3,047	,011
	X3=SubsidiBBM	1,529E-16	,000	,635	2,709	,020

a. Dependent Variable: Y=IndeksGini

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berikut persamaan regresi linier berganda berdasarkan hasil analisis:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n + e$$

$$Y = 0,327 + 0,001 X_1 + 1,302 X_2 - 1,529 X_3 + e$$

Dinyatakan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 0,327. Konsekuensinya, jika pertumbuhan ekonomi (X_1) dan alokasi umum (X_2) dan subsidi BBM (X_3) tetap konstan maka disparitas pendapatan di Indonesia yang dinyatakan dalam indeks gini akan mengalami peningkatan sebesar 0,327 poin. Koefisien regresi pada variabel pertumbuhan ekonomi bernilai 0,001 menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan di Indonesia, yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 persen maka disparitas pendapatan yang dinyatakan dengan nilai indeks gini akan meningkatkan sebesar 0,001 poin dengan asumsi X_2 dan X_3 konstan. Lalu koefisien regresi pada variabel dana alokasi umum bernilai 1,302 menunjukkan bahwa faktor dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan di Indonesia, yang artinya apabila dana alokasi umum mengalami peningkatan 1 triliun rupiah maka disparitas pendapatan yang dinyatakan dengan nilai indeks gini akan meningkat sebesar 1,302 poin dengan asumsi X_1 dan X_3 konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variasi variabel bebas yang dapat dijelaskan oleh model. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa nilai R Square sebesar 0,545 atau 54,5% yang berarti bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan subsidi BBM dapat menjelaskan variabel dependen yaitu disparitas pendapatan sebesar 54,5%. Sedangkan faktor lain yang tidak diperhatikan atau dibahas dalam penelitian ini dapat menjelaskan sisanya sebesar 45,5%.

Uji F

Seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus dinilai dengan menggunakan uji F dimana dasar pengambilan keputusan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ setelah hipotesis dikonfirmasi atau ketika variabel independen dan dependen memiliki pengaruh.. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F

Sumber Varian	Jumlah Kuadrat	Df	Kuadrat Tengah	F _{hitung}	F _{tabel}
Regresi	0,002	3	0,001	4,384	3,587
Sisa	0,002	11	0,000		
Total	0,004	14			

Sumber: Output SPSS yang diolah

Dari perhitungan uji F diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 4,384 > F_{tabel} = 3,587$ maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan subsidi BBM (X_3) berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap variabel dependen yaitu Disparitas Pendapatan Indonesia (Y).

Uji t

Uji hipotesis parsial digunakan untuk menilai kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2018). Ketika membuat keputusan, penting untuk mempertimbangkan apakah nilai signifikansi kurang dari 0,05 (hipotesis diterima) atau lebih dari 0,05 (hipotesis ditolak), serta apakah $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang menunjukkan bahwa variabel independen mungkin memiliki pengaruh terhadap variabel tak bebas.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	r^2 parsial
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	0,824	1,796	2,884
Dana Alokasi Umum (X_2)	3,047	1,796	26,171
Subsidi BBM (X_3)	2,709	1,796	25,4

Variabel terikat/dependen : Disparitas Pendapatan Indonesia

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar $0,824 < t_{tabel}$ sebesar 1,796. Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu menerima H_0 dan menolak H_a yang berarti pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak memiliki pengaruh secara nyata (signifikan) terhadap disparitas pendapatan Indonesia. Hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai sebesar $0,43 > 0,05$ dengan arti bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia. Setelah itu untuk hasil perhitungan variabel dana alokasi umum diketahui bahwa t_{hitung} sebesar $3,047 > t_{tabel}$ sebesar 1,796. Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti dana alokasi umum secara parsial memiliki pengaruh secara nyata (signifikan) positif terhadap disparitas pendapatan Indonesia. Hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi dari dana alokasi umum yang memiliki nilai sebesar $0,01 < 0,05$ dengan arti bahwa secara parsial, dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia.

Lalu untuk variabel subsidi BBM diketahui bahwa t_{hitung} sebesar $2,709 > t_{tabel}$ sebesar 1,796. Maka dapat disimpulkan hasilnya yaitu menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti subsidi BBM secara parsial memiliki pengaruh secara nyata (signifikan) positif terhadap disparitas pendapatan Indonesia. Hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi dari dana alokasi umum yang memiliki nilai sebesar $0,02 < 0,05$ dengan arti bahwa secara parsial, subsidi BBM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis data menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan analisis data, maka diperoleh hasil pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia periode tahun 2007-2021. Penyebabnya yaitu terjadinya *trickle up effect* dimana masyarakat yang memiliki kemudahan pada perekonomian lupa untuk melakukan pembangunan pada perekonomian kecil yang berada dibawahnya. Akibatnya, rakyat miskin akan menjadi semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya sehingga membuat manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan kaya saja.
2. Hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa antara tahun 2007 dan 2021 dana alokasi umum secara signifikan positif disparitas pendapatan Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena dana alokasi umum bukan dikelola untuk belanja pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi daerah yang akan menghasilkan pajak digunakan untuk pemasukan daerah serta peningkatan pelayanan publik melainkan untuk belanja pegawai, sehingga peningkatan pemberian dana alokasi umum akan menyebabkan meningkatnya disparitas pendapatan Indonesia.
3. Pengujian pada subsidi BBM membuktikan bahwa subsidi BBM memiliki hasil berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas pendapatan Indonesia periode tahun 2007-2021. Hal tersebut dikarenakan pemberian subsidi BBM tidak dinikmati oleh masyarakat miskin tetapi masyarakat yang tidak miskin juga dapat menikmati subsidi BBM

tersebut, Akibatnya, kesenjangan pendapatan akan melebar karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Saran

Ada berbagai rekomendasi untuk dipertimbangkan sehubungan dengan kesimpulan di atas dalam rangka perbaikan untuk kedepannya:

1. Daerah dengan perekonomian yang lemah diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Perhatian ini diberikan pemerintah berdasarkan keadaan di masing-masing lokasi. Misalnya pengembangan potensi wisata pada daerah yang memang memiliki potensi wisata. Pengembangan wisata ini salah satunya yaitu dengan melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas wisata yang diharapkan dapat meningkatkan wisatawan.
2. Pemerintah diharapkan lebih banyak memberikan perhatian kepada usaha-usaha kecil yang didirikan masyarakat. Usaha-usaha kecil ini jika lebih diperhatikan, maka akan berkembang sehingga kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kenaikan kebutuhan tenaga kerja diharapkan akan menyebabkan turunnya disparitas pendapatan.
3. Pemantauan DAU perlu ditingkatkan, dan denda untuk kinerja daerah yang di bawah standar akan berdampak pada depresiasi DAU. DAU harus diberikan berdasarkan ketentuan perjanjian; misalnya, mungkin hanya memperhitungkan sebagian kecil dari gaji staf, dengan sisanya digunakan untuk pengembangan. Atau, indikator kinerja perangkat yang dapat diakses dapat ditentukan untuk mendistribusikan DAU ke berbagai daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengontrol

bagaimana perangkat ini beroperasi karena membiayai infrastruktur birokrasi di daerah.

4. Pemerintah perlu mengkaji ulang untuk perbaikan regulasi subsidi BBM agar kebijakan ini dapat sesuai sasaran dan berjalan secara efisien. Untuk mengurangi kebocoran, kebijakan subsidi BBM diterapkan dengan tujuan yang lebih baik.
5. Selain aspek-aspek yang telah dicermati dalam penelitian ini, diharapkan para akademisi ke depan dapat melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, B., & Subrata, Y. (2018). Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1–13.
- Anas, M. (2019). Reforming Spending Policy and Its Impact on Indonesia's Economy: The Case of Fuel Subsidy and Infrastructure. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 12–27. <https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.7733>
- Arsyad, A. (2015). *Media pembelajaran* (Ed. Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, M. A. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017) Skripsi*. Universitas Islam Negeri.
- Diva, Y. F. (2015). *Dampak Realokasi Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Sektor Angkutan Darat Ke Sektor-Sektor Produksi Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga (Simulasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2008)*. Universitas Airlangga.
- Fitriani, F., Rahim, A., & Samsir, A. (2018). Analysis the Influence of Investment Level, Government Spending, Labor To Economic Growth in Bulukumba District. *Universitas Negeri Makassar*, 1–11. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/11007>
- Heryanah, H. (2017). Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia: Berdasarkan Susenas 2008, 2011 Dan 2013. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 10(2), 16. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i2.26>
- Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadi di Kabupaten Minahasa Utara Analysis Income Distribution of The People In The District Airmadidi North Minahasa Regency. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 818–830.
- Kuangan, K. R. (2022). *Model Proyeksi Konsumsi Bbm Bersubsidi*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2012/06/29/154102726712012-model-proyeksi-konsumsi-bbm-bersubsidi>
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.414.76-79>
- Masrum, A. (2022). Pengaruh

- Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (Bbm), Kenaikan Harga Minyak (Icp) Dan Inflasi Terhadap Pdb Riil. *Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.*
- Murti, W. (2016). *Tantangan Dan Peluang Sumber Daya Manusia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.* 1–23.
- Nazipawati. (2019). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Belajasumba Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik.*
- Nugraha, Y. N. (2019). Desentralisasi dan Ketergantungan Fiskal Daerah. *Detiknews.* <https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah>
- Peraturan Pemerintah RI. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah RI. (2004). *Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.*
- Ramadhan, Y. A. (2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019.* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2018). *Statistik Non Parametris untuk Penelitian.* Alfabeta.
- Sulaiman, F., & Ridwan, A. (2019). *STUDI KEBANTENAN dalam Perspektif Budaya dan Teknologi.* 1–162. <http://www.up.untirta.ac.id>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (ed. 11, ji). Erlangga.